



Pemilu Perancis dan Krisis Utang di Zona Euro

Humphrey Wangke^{*)}

Abstrak

Nicolas Sarkozy menjadi pemimpin negara di zona Euro ke 11 yang jatuh dari tampuk kekuasaannya karena krisis utang di kawasan tersebut. Ironisnya, kemenangan Francois Hollande meskipun telah diprediksi tetapi tetap saja menimbulkan guncangan. Sumber guncangan itu adalah janji Hollande yang akan memajukan perekonomian Perancis dengan bertumpu pada pertumbuhan daripada penghematan atau pemangkasan anggaran. Platform ekonomi ini membuat negara-negara Eropa, dan Asia, khawatir zona Euro semakin terjebak dalam krisis yang lebih luas lagi sebab negara-negara zona Euro telah sepakat untuk mengatasi krisis utang di kawasannya dengan melakukan penghematan anggaran.

Pendahuluan

Pada tanggal 6 Mei 2012, rakyat Perancis memberikan suaranya pada pemilu presiden putaran kedua antara petahana Presiden Nicholas Sarkozy dari Partai Serikat Gerakan Rakyat dengan penantanginya dari partai Sosialis, Francois Hollande. Lebih dari 46 juta pemilih berhak memberikan suaranya dan 80 persen dari jumlah itu diperkirakan memberikan suaranya. Jumlah pemilih yang memberikan suaranya itu tergolong tinggi berdasarkan standar di sebuah negara yang terpecah kurang lebih 50-50 antara kubu yang condong ke kiri dan yang condong ke kanan.

Hasil akhir dari pemilu tersebut menunjukkan kandidat dari partai Sosialis Francois Hollande berhasil mengalahkan Sarkozy untuk merebut kursi kepresidenan dengan selisih suara yang sangat tipis 51,67%

berbanding 48,33%. Sarkozy tidak disukai banyak pemilih karena caranya menangani perekonomian dan kepribadiannya yang kasar tidak mencerminkan gaya ningrat Perancis. Hollande berhasil mengambil keuntungan dari semangat anti-Sarkozy, sebab sebagian pemilih mengatakan pilihan mereka lebih merupakan suara menentang Sarkozy daripada suara bagi Hollande.

Pemilu hari Minggu itu bukan hanya sekedar pertarungan kursi bagi Presiden Nicholas Sarkozy, akan tetapi lebih dari itu, yaitu pertarungan kredibilitas budaya ekonomi Perancis serta masa depan kesepakatan ekonomi negara-negara Uni Eropa. Lebih jauh lagi, hasil pemilu ini sangat penting bagi masa depan Perancis karena akan berdampak pada upaya mengatasi krisis utang Perancis, berapa lama pasukan Perancis berada di Afghanistan,

^{*)} Peneliti Masalah-masalah Hubungan Internasional pada Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, e-mail: dhanny_2000@yahoo.com

dan bagaimana Perancis memainkan kekuatan militer dan diplomatiknya di seluruh dunia.

Tulisan ini akan fokus pada penyelesaian utang negara-negara anggota zona Euro mengingat Francois Hollande yang memenangkan pilpres Perancis menolak pendekatan penghematan anggaran (*austerity*) yang dicanangkan oleh Kanselir Jerman Angela Merkel dan Presiden Perancis Nicholas Sarkozy.

Dilema zona Euro: Ekspansi Ekonomi atau Program Penghematan?

Krisis utang yang terjadi di zona euro berakar dari dalam yaitu akibat kesalahan dalam satu dekade lebih, berupa penumpukan utang terus menerus tanpa kendali. Tumpukan utang itu sudah sedemikian tinggi sehingga melebihi angka 60 persen dari produk domestik bruto (PDB). Angka 60 persen dianggap sebagai ambang batas tertinggi yang aman bagi satu negara. Namun ambang batas itu dilanggar selama bertahun-tahun. Ketika utang terus membesar dan terdapat gejala negara akan gagal bayar, para investor justru tidak bersedia lagi memasok utang baru ke sejumlah negara zona Euro, yang pada satu dekade justru sudah sangat tergantung pada pasokan utang. Hal ini diperburuk oleh sentimen pasar dengan menarik dana dari sejumlah bank yang dianggap beresiko tinggi, karena memegang sejumlah obligasi terbitan negara zona euro, yang tidak mampu membayar utang. Faktor ini membuat aliran kredit menjadi tidak lancar dan investor internasional meninggalkan negara-negara zona euro.

Kemenangan Partai Sosialis di Perancis sebenarnya bukanlah suatu hal yang luar biasa, karena situasi yang sama juga terjadi di beberapa negara zona Euro lainnya seperti di Belanda, Yunani, dan Spanyol. Namun kemenangan kelompok Sosialis di Perancis mempunyai nilai yang berbeda karena Perancis bersama-sama Jerman merupakan motor penyelamatan Eropa. Ada kekuatiran, perubahan orientasi kebijakan di Perancis akan mengacaukan

proyek penyelamatan Eropa. Lebih luas lagi, perdebatan antara pendekatan pengetatan anggaran dan ekspansi demi menyokong pertumbuhan mulai dipertentangkan. Kemenangan kelompok kiri di sejumlah negara Eropa itu sekaligus menandai perlawanan masyarakat terhadap program penghematan.

Kesahihan kebijakan pengetatan anggaran melawan krisis, seperti pemotongan asuransi sosial, tunjangan pensiun dan tunjangan kepada penganggur mulai dipertanyakan. Kebijakan ini dianggap pro siklus (*procycle policy*) atau justru menjerumuskan ekonomi pada fase krisis yang lebih dalam. Joseph Stiglitz termasuk dalam pengkritik kebijakan penghematan. Eropa justru membutuhkan pertumbuhan lebih tinggi. Pemerintah, terutama Jerman, diharapkan melakukan ekspansi anggaran di bidang infrastruktur, transportasi massal, dan proyek-proyek yang banyak menyerap tenaga kerja.

Krisis sebenarnya merupakan siklus yang pasti berulang. Hanya mekanisme dan dinamikanya yang berbeda. Karena secara alamiah, koreksi dan perubahan biasanya baru dilakukan setelah krisis terjadi. Karenanya, mempertentangkan orientasi kebijakan ekspansif yang mendorong pertumbuhan dengan penghematan sebagai langkah penyelamatan fiskal tidak sepenuhnya benar. Hanya saja didalam demokrasi tidak ada isitilah benar-salah atau baik-buruk. Yang ada adalah kebijakan yang dapat dukungan publik lebih banyak atau tidak. Kini dukungan publik di Eropa sedang mengarah pada pola ekspansif. Alasannya sangat sederhana: masyarakat tidak ingin berbagai fasilitas yang sudah dinikmati selama ini hilang.

Tantangan Francois Hollande

Kekecewaan warga Perancis pada kelesuan ekonomi negaranya telah berimbas pada hasil pemilu. Banyak warga yang jatuh miskin karena menjadi pengangguran dan kehilangan bonus. Namun itu semua sebenarnya bukan kesalahan Nicholas Sarkozy, yang dikalahkan oleh Francois Hollande. Itu semua kesalahan zona euro

yang terjebak dalam krisis utang luar negeri yang berkepanjangan.

Langkah penghematan yang kini tengah gencar dilakukan negara-negara Eropa mendapat tantangan keras dari Perancis. Terpilihnya Hollande menandai berakhirnya duet Perancis-Jerman dalam menghadapi krisis utang yang melanda zona Euro. Sarkozy sebelumnya bahu membahu dengan Kanselir Jerman Angela Merkel sehingga duet mereka mendapat julukan Merkozy. Dibawah Hollande, Perancis tidak ingin mengikuti kebijakan Merkozy soal program pengencangan ikat pinggang. Hollande justru menantang fokus kebijakan Merkozy yang memaksakan penghematan anggaran dan meminta elemen pertumbuhan ekonomi masuk dalam pakta anggaran Eropa.

Selama kampanye, Hollande menjanjikan akan mengembalikan hak-hak pensiunan dan hak-hak pekerja. Hollande juga menjanjikan peningkatan kembali program pemerintah atau mengembalikan program pengeluaran pemerintah seperti sedia kala. Ia juga berjanji membuat jalan baru bagi Eropa untuk keluar dari krisis tanpa tidak melibatkan langkah penghematan berlebihan. Namun semua janji itu dianggap tidak realistis sehingga mengundang banyak keraguan dari berbagai pihak karena beberapa alasan.

Pertama, didalam negeri Hollande menghadapi masalah utang negara yang sangat besar, pertumbuhan ekonomi yang lemah, pengangguran tinggi, dan daya saing yang terus menurun. Ia mewarisi perekonomian Perancis yang sesungguhnya tidak mendukung untuk menjalankan kebijakan pertumbuhan selain penghematan. Kinerja perekonomian Perancis kini praktis berada dalam posisi yang sama seperti Yunani yaitu terlilit utang yang luar biasa.

Berdasarkan data dari BBC, total utang luar negeri Perancis mencapai 4,2 triliun Euro atau 235 persen di atas produk domestik bruto (PDB). Besaran PDB Perancis adalah 1,8 triliun Euro. Dengan demikian Perancis sebenarnya telah melanggar rambu-rambu keamanan ekonomi yang dicanangkan zona Euro, yaitu maksimal utang negara adalah 60 persen dari PDB.

Karena itu, lembaga pemeringkat *Standard and Poor's* menurunkan tingkat peringkat utang Perancis dari AAA menjadi AA+. Artinya, secara teoritis utang Perancis masih dianggap aman, tetapi sudah tidak seaman sebelumnya.

Kedua, di forum Eropa, Hollande harus berhadapan dengan Kanselir Jerman, Angela Merkel, yang bersama Sarkozy merancang pakta pengetatan anggaran Uni Eropa. Merkel telah menegaskan pakta itu tak dapat dinegosiasikan ulang.

Mungkinkah Hollande mendapatkan dukungan agar bisa melaksanakan programnya yang populis? Perbankan Perancis kini terperangkap dalam piutang ragu-ragu dalam jumlah besar karena banyak kreditnya yang disalurkan ke Yunani, Italia, Spanyol dan sejumlah negara zona Euro lainnya masih berada dalam kondisi macet. Seharusnya, sebuah perekonomian bisa tertolong dengan bangkitnya konsumsi swasta dan naiknya investasi asing dan domestik. Namun konsumsi swasta Perancis kini sedang tertekan karena dibawah Sarkozy pengangguran sudah mencapai 10 persen dari seluruh jumlah penduduk. Bahkan untuk usia antara 15-24 tahun, jumlah angka pengangguran di Perancis mencapai 25 persen. Artinya konsumsi sedang mengalami penurunan. Sementara investor asing dan domestik telah mengalihkan saham-sahamnya ke negara-negara lain yang lebih menguntungkan.

Di dalam 10 tahun terakhir ini, paling tidak di bawah Presiden Nicholas Sarkozy, Perancis bisa memelihara pertumbuhan ekonominya dengan menumpuk utang yang bersumber dari pinjaman Inggris, Jerman dan Amerika Serikat. Utang inilah yang bisa membuat Perancis tetap melanjutkan alokasi pengeluaran pemerintah walaupun berdampak pada penumpukan utang. Namun jika melihat perkembangan terakhir, pendekatan semacam itu tidak dapat lagi dipraktekkan.

Inggris dan AS sedang kesulitan ekonomi. Sementara Jerman telah mencanangkan semua negara anggota zona euro tidak dapat lepas dari program penghematan utang. Kanselir Jerman Angela Merkel sudah menyatakan bahwa kesepakatan tentang penghematan anggaran

tidak dapat dirundingkan kembali. Merkel berpendapat bahwa ekonomi zona Euro hanya bisa sehat melalui perampingan pengeluaran pemerintah, liberalisasi ekonomi serta reformasi struktural. Karenanya, banyak yang beranggapan bahwa perekonomian Perancis dan zona Euro berpeluang bangkit jika menjalankan kebijakan *austerity* secara ketat.

Pelajaran bagi Indonesia

Belajar dari proses politik di Perancis dan Eropa pada umumnya, paling tidak ada dua pelajaran yang berarti bagi Indonesia. *Pertama*, sebuah kebijakan tidak saja mengandung unsur teknokratis tetapi juga legitimasi politik. Ketidakmampuan menjaring dukungan politik, dengan segera akan menegasi alasan-alasan teknokratis. Hal ini bisa dilihat dari kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak. Penolakan terhadap kebijakan tersebut bukan semata-mata karena kelemahan argumen teknokratis melainkan akibat lemahnya legitimasi politik.

Kedua, sebagai langkah antisipasi jika terjadi krisis, pemerintah justru perlu melakukan langkah perubahan ketika perekonomian sedang berada dalam kondisi yang baik. Ujian bagi suatu pemerintahan justru terletak pada kemampuannya mengelola perubahan pada saat perekonomian sedang mengalami *booming*.

Ketiga, sekali memutuskan terlibat dalam sebuah organisasi yang dibentuk melalui perjanjian yang bersifat *binding*, maka itu berarti kita harus mau menyerahkan sebagian kedaulatan ke organisasi tersebut. Perancis ternyata belum siap dengan kondisi semacam itu.

Penutup

Kemenangan partai Sosialis di Perancis menjadi simbol dari ketidakpuasan masyarakat terhadap program penghematan yang dicanangkan oleh negara-negara

anggota zona Euro sebagai upaya untuk mengatasi krisis utang. Penghematan dinilai bukan menyelesaikan masalah tetapi justru membuat rakyat semakin miskin karena hilangnya berbagai fasilitas yang selama ini dinikmati. Kemenangan Francois Hollande dari Partai Sosialis membawa nuansa baru di dalam zona Euro karena ia menolak kesepakatan tentang penghematan anggaran sebagai solusi untuk mengatasi masalah utang. Ia lebih menghendaki kebijakan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sebagai model untuk mengatasi masalah utang. Namun pendekatan barunya ini banyak mendapat tantangan dari pelaku pasar baik dari kalangan pemerintah maupun swasta karena dianggap tidak realistis sebab Perancis sendiri tidak memiliki cukup dana untuk berbelanja besar sesuai dengan tema kampanyenya.

Rujukan:

1. "Perancis Memilih Presiden", *Kompas*, 7 Mei 2012, hal. 8.
2. "Transformasi Sarkozy Seusai Kekalahan", *Media Indonesia*, 8 Mei 2012, hal. 12.
3. "Tiada Bulan Madu bagi Hollande", *Media Indonesia*, 8 Mei 2012, hal. 12.
4. "Hollande Disambut Sikap Pesimistis", *Kompas*, 8 Mei 2012, hal. 1.
5. "Hollande Bukan Solusi", *Kompas*, 8 Mei 2012, hal. 11.
6. "Metamorfosis Sosialis, Titik Balik Eropa", *Kompas*, 8 Mei 2012, hal. 6.
7. "Jepang Tekan Hollande", *Kompas*, 9 Mei 2012, hal. 11.
8. A. Prasetyantoko, "Kemenangan Kaum Sosialis", *Kompas*, 9 Mei 2012, hal. 6.
9. "Menlu: Hubungan Indonesia-Perancis Tak Berubah", dalam Kompas.com, edisi Selasa, 8 Mei 2012, diakses 10 Mei 2012.
10. "Uni Eropa Gelar Pertemuan Luar Biasa", *Koran Tempo*, 10 Mei 2012, hal. A 15.
11. "Hollande Janjikan Jalan Baru", *Kompas*, 16 Mei 2012, hal. 8.